

Evaluation Of The Point Of Sale (POS) Program As A Strategy To Enhance Tax Accountability Awareness Among Business Actors In Banyuasri Market

Evaluasi Program Point Of Sale (POS) Sebagai Strategi Peningkatan Kesadaran Akuntabilitas Pajak Pada Pelaku Usaha Di Pasar Banyuasri

Made Devita Indra Kusuma^{1*}, Ni Luh Gede Erni Sulindawati², Putu Eka Dianita Marviliati Dewi³

Program Studi Akuntansi; Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali^{1,2,3}
devita.indra@student.undiksha.ac.id¹

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of the Point of Sale (POS) Program as a strategy to increase tax accountability awareness among business actors at Banyuasri Market using the CIPP evaluation model (Context, Input, Process, Product). This research is an evaluative study with a descriptive quantitative approach. Data were collected through questionnaires and interviews with traders at Banyuasri Market. The results show that: (1) In terms of context, the POS program matches the traders' needs for transaction recording but still raises resistance regarding tax obligations; (2) In terms of input, facilities and training provided are sufficient, yet limited digital literacy among traders remains a challenge; (3) In terms of process, the implementation of POS has not been fully optimized since some traders are reluctant to use the application; (4) In terms of product, POS improves transaction transparency, but the increase in tax accountability awareness is still low due to concerns over tax consequences. Therefore, the POS program in Banyuasri Market needs to be improved in terms of assistance, tax socialization, and security features to strengthen traders' trust and build an accountability culture.

Keywords: Point of Sale (POS) Program; Tax Accountability Awareness; Business Actors

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Program Point of Sale (POS) sebagai strategi peningkatan kesadaran akuntabilitas pajak pada pelaku usaha di Pasar Banyuasri dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara pada pedagang di Pasar Banyuasri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pada aspek konteks, program POS sesuai dengan kebutuhan pedagang untuk pencatatan transaksi namun masih menimbulkan resistensi terkait kewajiban pajak; (2) Pada aspek input, fasilitas dan pelatihan yang diberikan cukup baik, namun keterbatasan literasi digital pedagang menjadi kendala; (3) Pada aspek proses, implementasi POS belum sepenuhnya optimal karena sebagian pedagang enggan menggunakan aplikasi; (4) Pada aspek produk, POS mampu meningkatkan transparansi transaksi, tetapi peningkatan kesadaran akuntabilitas pajak masih rendah karena adanya kekhawatiran terhadap konsekuensi perpajakan. Dengan demikian, program POS di Pasar Banyuasri perlu ditingkatkan pada aspek pendampingan, sosialisasi pajak, serta pengembangan fitur keamanan untuk memperkuat kepercayaan pedagang dan membangun budaya akuntabilitas.

Kata Kunci: Program Point Of Sale (POS); Kesadaran Akuntabilitas Pajak; Pelaku Usaha

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional karena kontribusinya terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, dan investasi nasional. Data Badan Pusat Statistik (2020) menunjukkan bahwa UMKM berjumlah 64,2 juta unit dengan kontribusi 56–59% terhadap PDB serta menyerap 97% tenaga kerja. Namun, UMKM umumnya memiliki keterbatasan modal, SDM, serta sistem manajemen yang

masih sederhana dan manual (Ilma & Muid, 2023; Sumarto, 2023; Candrani, 2023). Kondisi ini menyebabkan pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan sering kali kurang akurat dan lambat, sehingga digitalisasi sistem informasi akuntansi menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan usaha (Julianto et al., 2022).

Salah satu solusi digital yang berkembang adalah penggunaan Point of Sale (POS), yaitu sistem terkomputerisasi yang mengintegrasikan perangkat keras dan lunak untuk mencatat transaksi, mengelola stok, dan menghasilkan laporan keuangan secara real-time (Bere et al., 2023). POS berbasis mobile bahkan memungkinkan operasional lintas platform dengan infrastruktur yang lebih sederhana (Prakoso & Priharsari, 2022). Implementasi POS terbukti meningkatkan ekspektasi kinerja dan mendorong perilaku penggunaan teknologi di kalangan pelaku UMKM (Ilma & Muid, 2023). Di Kabupaten Buleleng, berbagai model POS telah diterapkan, mulai dari sistem berbasis cloud, POS Android offline, hingga integrasi dengan QRIS dalam mendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah (Disdagperinkopukm Kabupaten Buleleng, 2025).

Secara konseptual, POS berpotensi memperkuat transparansi dan akuntabilitas karena setiap transaksi terekam secara digital dan menyediakan jejak audit yang dapat diverifikasi otoritas pajak (Prameswari et al., 2025). Dalam sistem self-assessment, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor krusial dalam optimalisasi penerimaan negara (Dewi & Darma, 2024). Oleh karena itu, adopsi POS tidak hanya berdampak pada efisiensi operasional, tetapi juga berkontribusi dalam membangun kultur akuntabilitas dan kesadaran pajak (Kumanireng & Bayu Utomo, 2023; Wilhelmus et al., 2022; Wiraksini et al., 2025). Namun demikian, sistem digital tetap memerlukan mekanisme reviewability dan audit trail yang memadai agar akuntabel dan tidak mudah dimanipulasi (Cobbe et al., 2021; Point et al., 2025).

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa adopsi POS di pasar tradisional meningkatkan efisiensi transaksi dan minat penggunaan teknologi, dengan faktor *perceived usefulness* dan *ease of use* sebagai determinan utama (Adeliana et al., 2019; Divayana et al., 2020; Nurcholisha, 2022; Atmojo et al., 2020; Siswanto et al., 2023; Sumarto, 2023). Namun, sebagian besar studi masih berfokus pada aspek teknis dan perilaku pengguna, belum mengevaluasi secara komprehensif konteks, input, proses, dan hasil program sebagaimana pendekatan evaluatif seperti CIPP (Poti & Mahadiansar, 2020; Sumeyasa et al., 2020; Sunu, 2023).

Di Pasar Tradisional Banyuasri, yang menaungi sekitar 280 pedagang dengan rata-rata 1.200 transaksi per hari (Disdagperinkopukm Kabupaten Buleleng, 2025), implementasi POS menghadapi resistensi. Sebelum digitalisasi, pencatatan dilakukan secara manual sehingga rentan kesalahan dan keterlambatan laporan. Namun, sebagian pedagang menolak penggunaan POS karena khawatir data transaksi terhubung langsung dengan instansi pajak dan meningkatkan beban pajak mereka (Wawancara dengan Informan A, B, C, dan D, Juli 2025). Fenomena ini menunjukkan adanya persepsi bahwa transparansi merupakan ancaman, bukan bagian dari tanggung jawab tata kelola usaha yang baik.

Dalam pelayanan publik, akuntabilitas dan transparansi menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan terhadap sistem perpajakan (Dewi dkk., 2020; Fatmawati dkk., 2024). Resistensi pedagang mencerminkan kesenjangan antara tujuan program dan persepsi penerima manfaat, sebagaimana fenomena umum dalam implementasi kebijakan publik (Fitrianingsi, 2024). Oleh karena itu, evaluasi program POS menjadi penting untuk menilai tidak hanya efisiensi teknis, tetapi juga dampaknya terhadap kesadaran akuntabilitas pajak dan perubahan perilaku pedagang (Hermanto et al., 2022; Kumanireng & Utomo, 2023; Wiraksini et al., 2025).

Dengan pendekatan evaluatif yang komprehensif, penelitian ini berupaya mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta tantangan implementasi POS di Pasar Banyuasri. Kebaruan penelitian terletak pada fokusnya yang mengintegrasikan aspek teknis digitalisasi

dengan dimensi perubahan perilaku dan kesadaran perpajakan. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan strategi pendampingan yang lebih adaptif dan kontekstual guna memperkuat budaya akuntabilitas dan mendukung transformasi digital pasar rakyat secara transparan dan berkeadilan (Adeliana et al., 2019; Poti & Mahadiansar, 2020).

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Evaluasi Program

Evaluasi program merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansi suatu program dalam mencapai tujuan. Yusuf (2017) menyatakan bahwa evaluasi merupakan upaya terencana untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna mengetahui keberhasilan program. Evaluasi tidak hanya menilai hasil, tetapi juga konteks dan proses pelaksanaan. Model yang banyak digunakan adalah CIPP (Context, Input, Process, Product) yang diperkenalkan oleh Stufflebeam. Penerapannya terbukti efektif dalam berbagai bidang, seperti layanan percepatan jabatan (Sumiani, 2023), sistem e-learning (Utami, Arthana, dan Darmawiguna, 2020), indikator kinerja organisasi (Lasmawan, 2021), latihan psikologis olahraga (Danardani dan Hidayat, 2022), serta asesmen kinerja dalam pembelajaran (Santosa, Candiasa, dan Koyan, 2013). Secara teoretis, Zhang, (2011) menjelaskan bahwa model CIPP merupakan kerangka kerja sistematis yang menyediakan informasi evaluatif secara menyeluruh dan berfungsi formatif maupun sumatif untuk peningkatan mutu program. Komponen context mengidentifikasi kebutuhan dan keselarasan tujuan; input menilai strategi dan sumber daya; process memantau pelaksanaan; dan product menilai output, outcome, efektivitas, efisiensi, dampak, serta keberlanjutan. Arikunto (2014) menegaskan bahwa model CIPP merupakan kerangka sistematis untuk pengambilan keputusan dalam merencanakan, melaksanakan, dan menyempurnakan program, meliputi evaluasi konteks, input, proses, dan produk (Arikunto, 2014). Secara keseluruhan Arikunto, (2014) memandang CIPP sebagai alat perbaikan berkelanjutan. Stufflebeam (2007) melalui "The CIPP Model for Evaluation" menekankan bahwa evaluasi bersifat decision oriented untuk membantu perbaikan dan pengembangan program, serta menjadi dasar keputusan melanjutkan, memodifikasi, atau menghentikan program (Mahadewi et al., 2023). Pengembangan lebih lanjut oleh Zhang et al. (2011) menegaskan bahwa model ini bersifat komprehensif, adaptif, dan mendukung perbaikan berkelanjutan melalui evaluasi konteks, input, proses (Zhang et al., 2011), dan produk secara menyeluruh.

2.2 Program Point of Sale (PoS)

Penerapan program Point of Sale (PoS) sebagai sistem informasi digital dalam sektor perdagangan, khususnya pasar tradisional, memiliki implikasi signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas pelaporan dan pembayaran pajak. Secara teoritis, hal ini dapat dijelaskan melalui model keberhasilan sistem informasi DeLone & McLean (2003) yang menekankan enam dimensi utama: system quality, information quality, service quality, intention to use/use, user satisfaction, dan net benefits. Dalam konteks PoS, system quality tercermin pada kemudahan penggunaan, kecepatan pencatatan transaksi, dan keandalan data real-time (DeLone & McLean, 2003; Petter, DeLone, & McLean, 2008), sedangkan information quality terlihat dari akurasi, kelengkapan, dan relevansi data transaksi sebagai dasar penghitungan pajak (Gorla, Somers, & Wong, 2010). Program PoS juga menghasilkan net benefits berupa peningkatan transparansi fiskal, efisiensi pelaporan, dan penguatan audit berbasis bukti digital yang mendukung akuntabilitas wajib pajak (DeLone & McLean, 2003; Wixom & Todd, 2005). Hal ini sejalan dengan OECD (2018) yang menegaskan bahwa digitalisasi pelaporan transaksi memperkuat integritas fiskal dan meminimalkan manipulasi data. Lemahnya tata kelola dapat membuka peluang penghindaran pajak (Pertiwi et al., 2025), namun sistem digital seperti PoS memungkinkan akses langsung otoritas terhadap data transaksi aktual sehingga memperkecil

kesenjangan penerimaan pajak (OECD, 2019; OECD, 2021). World Bank (2020) juga menunjukkan bahwa implementasi sistem digital seperti PoS dan e-receipt systems di negara berkembang meningkatkan penerimaan pajak hingga 15–20%. Dari perspektif akuntabilitas fiskal, PoS dapat diposisikan sebagai instrumen kontrol publik sesuai kerangka Romzek dan Dubnick (1994) serta penguatan oleh OECD dan World Bank. Akuntabilitas fiskal menuntut transparansi, keadilan, dan keterukuran dalam penerimaan pajak (OECD, 2018). Dengan PoS, transaksi terdokumentasi otomatis dan berbasis data elektronik sehingga mengurangi estimasi subjektif (World Bank, 2022), serta memperkuat public accountability pelaku usaha kepada pemerintah dan masyarakat (Mikesell, 2011; Ebrahim, 2005).

2.3 Kesadaran dan Akuntabilitas Perpajakan

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting dalam mendorong kepatuhan perpajakan, yaitu kondisi ketika wajib pajak mengetahui, memahami, dan bersedia melaksanakan kewajiban pajak secara sukarela (Dewi dkk., 2020; Fitrianiingsi, 2024). Dalam perspektif Theory of Planned Behavior (TPB), kesadaran berkaitan dengan norma subjektif yang membentuk niat patuh melalui tekanan sosial positif (Dewi dkk., 2020). Indikator kesadaran meliputi pemahaman hak dan kewajiban, kepercayaan kepada sistem, serta alokasi dana khusus untuk pajak (Dewi dkk., 2020). Akuntabilitas pajak merupakan bentuk pertanggungjawaban otoritas fiskal kepada masyarakat atas pengelolaan dana pajak (Fatmawati dkk., 2024). Transparansi penggunaan dana dan kemudahan pelayanan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Fatmawati dkk., 2024). Dalam pelayanan publik, akuntabilitas menjembatani kesenjangan antara harapan masyarakat dan layanan pemerintah, serta harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan atasan instansi (Dewi dkk., 2020). Implementasi Point of Sale (POS) di pasar tradisional berpotensi meningkatkan transparansi transaksi dan kepatuhan pajak UMKM, namun efektivitasnya memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap kompetensi pelaku, pengendalian internal, pengawasan, dan dukungan kebijakan. Penelitian Gst. Ayu Ketut Rencana Sari Dewi memberikan landasan penting dalam konteks ini (Dewi, 2021; 2019; 2014). Dewi (2021) menyatakan bahwa “kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas”, menunjukkan pentingnya kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem POS. Literasi pajak juga membentuk perilaku patuh secara sukarela (Herawati et al., 2022). Selain itu, Dewi (2020) menegaskan bahwa “akuntabilitas mempunyai pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa”, yang relevan dengan peningkatan efektivitas pelaporan pajak melalui POS. Faktor moralitas individu dan pengendalian internal juga krusial dalam mencegah penyimpangan (Dewi, 2014). Dalam penelitiannya “Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal pada Kecurangan Akuntansi” (SciSpace, 2014), Dewi (2014) menekankan pentingnya etika dan kontrol internal. Ia juga menyebut adanya “there exists a BPD’s supervisory function expectation-gap” (Ejournal STIESIA, 2018), yang menunjukkan pentingnya penyesuaian fungsi pengawasan dalam implementasi POS. Lebih lanjut, Dewi (2022) melalui “Analisis strategi pengelolaan keuangan dan strategi keberlanjutan usaha” menegaskan bahwa strategi pengelolaan keuangan harus mendukung keberlanjutan usaha. Dengan demikian, evaluasi program POS di Pasar Banyuasri perlu mempertimbangkan kompetensi pengguna, akuntabilitas transaksi, pengendalian internal, fungsi pengawasan, dan keberlanjutan usaha. Sinergi faktor-faktor tersebut akan memperkuat kesadaran dan akuntabilitas pajak serta mendorong sistem fiskal yang transparan dan berkeadilan di pasar tradisional.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan mengevaluasi program penggunaan aplikasi Point of Sale (POS) oleh pedagang Pasar Banyuasri dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan pajak. Pendekatan deskriptif kuantitatif digunakan

untuk menggambarkan fenomena berdasarkan data numerik dan analisis statistik secara objektif (Creswell & Creswell, 2018). Landasan teoritis penelitian mengacu pada Technology Acceptance Model (TAM) (Venkatesh & Davis, 2018), IS Success Model (DeLone & McLean, 2020), teori akuntabilitas publik dan kepatuhan pajak (OECD, 2021), serta menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan Stufflebeam. Model CIPP dinilai komprehensif dan mendukung pengambilan keputusan (Rama dkk., 2023; Salsabila dkk., 2024; Arikunto, 2014).

Populasi penelitian adalah 1.096 pedagang Pasar Tradisional Banyuasri (PD. Pasar Tradisional Banyuasri, 2025). Sampel ditentukan menggunakan purposive sampling (Sugiyono, 2019) dengan rumus Slovin tingkat kesalahan 10% (Sugiyono, 2017), sehingga diperoleh 92 responden. Data dikumpulkan melalui observasi dan kuesioner dengan skala Likert lima tingkat (Sugiyono, 2013; Sugiyono, 2014). Uji validitas menggunakan Pearson Product Moment dengan taraf 0,05 (Qomariyah et al., 2023), sedangkan reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha > 0,6 (Qomariyah et al., 2023).

Kerangka evaluasi mencakup variabel Context, Input, Process, dan Product. Konstruk Perceived Ease of Use (PEOU) dalam TAM menjelaskan persepsi kemudahan penggunaan sistem (Widiyanti, 2020; Rahman & Sari, 2022). Keberhasilan POS juga dianalisis berdasarkan model DeLone & McLean (2003) melalui dimensi system quality, information quality, dan net benefits (Petter et al., 2008; Gorla et al., 2010), serta dikaitkan dengan temuan OECD (2018; 2019; 2021; 2022), World Bank (2020; 2022), Romzek & Dubnick (1994), Ebrahim (2005), Mikesell (2011), dan Gani (2023). Konsep kesadaran dan akuntabilitas pajak merujuk pada Dewi dkk. (2020), Fitrianiingsi (2024), dan Fatmawati dkk. (2024).

Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif melalui transformasi Z-score dan T-score (Arikunto, 2019; Creswell & Creswell, 2018; Komarudin & Sarkadi, 2017; Agung dkk, 2023; Azwar, 2013). Interpretasi efektivitas program menggunakan Kuadran Glickman (Glickman, 1981; Putra dkk, 2019; Nurkholis & Suharyanto, 2020; Wang & Zhang, 2021; Susanto & Kartowagiran, 2021). Kriteria efektivitas dibagi menjadi SKE, KE, E, dan SE (Agung dkk, 2021), dengan prinsip evaluasi untuk menjaga objektivitas dan akuntabilitas hasil (Mahmudi, 2011). Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder (Paramita dkk, 2021). Seluruh instrumen variabel Context, Input, Process, dan Product dinyatakan valid dan reliabel dengan koefisien reliabilitas masing-masing 0,841; 0,679; 0,794; dan 0,855, yang menunjukkan derajat reliabilitas tinggi hingga sangat tinggi..

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Untuk mengukur kategori efektivitas program *Point Of Sale* (POS) sebagai strategi peningkatan kesadaran akuntabilitas pajak pada pelaku usaha di Pasar Banyuasri, dilakukan analisis deskriptif kuantitatif dan menggunakan analisis skor-T. Analisis deskriptif dilakukan terhadap keempat variabel yaitu variabel konteks, input, proses dan produk. Setelah masing-masing dianalisis dengan skor-T, selanjutnya ditentukan arah efektivitasnya. Hasil analisis data untuk skor variabel konteks, input, proses dan produk dengan skor-T dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Per Butir Masing-Masing Item Kuisisioner Konteks

No Butir	Skor Z	Arah
1	0,571187	Positif
2	-0,92269	Negatif
3	1,625687	Positif
4	-0,83481	Negatif
5	-0,65906	Negatif

6	0,219687	Positif
Jumlah +		3
Jumlah -		3
Hasil		Positif

Berdasarkan Tabel 1. dapat diketahui bahwa dari 6 butir item pertanyaan, 3 diantaranya mendapatkan hasil positif yaitu butir 1 (0,571187), butir 3 (1,625687), dan butir 6 (0,219687), sedangkan 3 butir lainnya mendapatkan hasil negatif yaitu butir 2 (-0,92269), butir 4 (-0,83481), dan butir 5 (-0,65906). Dengan jumlah positif dan negatif yang seimbang, kekuatan skor positif lebih dominan terutama pada butir 3 dengan skor Z tertinggi sebesar 1,625687. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program *Point of Sale* (POS) sebagai strategi peningkatan kesadaran akuntabilitas pajak pada pelaku usaha di Pasar Banyuasri dari sisi konteks telah berjalan dengan baik. Evaluasi efektivitas pada aspek konteks ini mencerminkan bahwa kondisi lingkungan, kebutuhan, serta latar belakang penerapan program POS mampu mendukung ketercapaian tujuan program. Keberhasilan konteks ini menjadi dasar penting bagi pelaksanaan program selanjutnya agar dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan. Selanjutnya pada variable input dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi Per Butir Masing-Masing Item Kuisisioner Input

No Butir	Skor Z	Arah
1	-0,70653	Negatif
2	-0,94877	Negatif
3	0,020187	Positif
4	0,746903	Positif
5	1,59474	Positif
6	-0,70653	Negatif
Jumlah +		3
Jumlah -		3
Hasil		Positif

Berdasarkan 2. tampak bahwa dari 6 butir item pertanyaan pada variabel input, terdapat 3 butir yang mendapatkan hasil positif yaitu butir 3 (0,021087), butir 4 (0,746003), dan butir 5 (1,59474), sementara 3 butir lainnya memperoleh hasil negatif yaitu butir 1 (-0,70653), butir 2 (-0,94877), dan butir 6 (-0,70653). Dengan jumlah yang seimbang antara skor positif dan negatif, hasil keseluruhan menunjukkan arah efektivitas positif karena skor tertinggi berada pada butir 5 dengan nilai 1,59474. Temuan ini menegaskan bahwa dari sisi input, program POS memiliki dukungan yang memadai, baik dari segi sumber daya, sarana prasarana, maupun kesiapan pelaku usaha dalam mengoperasikan sistem. Evaluasi ini menegaskan bahwa ketersediaan input program mampu mendorong tercapainya peningkatan kesadaran akuntabilitas pajak, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu dibenahi. Selanjutnya pada variable proses dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Per Butir Masing-Masing Item Kuisisioner Proses

No Butir	Skor Z	Arah
1	-1,2532	Negatif
2	-0,53709	Negatif
3	1,43223	Positif
4	0,537086	Positif
5	-0,71611	Negatif
6	0,537086	Positif
Jumlah +		3

Jumlah -	3
Hasil	Positif

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa dari 6 butir item pertanyaan, 3 item mendapatkan hasil positif yaitu butir 3 (1,43223), butir 4 (0,537086), dan butir 6 (0,537086), sedangkan 3 butir lainnya memperoleh hasil negatif yaitu butir 1 (-1,2532), butir 2 (-0,53709), dan butir 5 (-0,71611). Meskipun jumlah skor positif dan negatif sama, arah efektivitas tetap positif karena butir 3 menunjukkan skor tertinggi sebesar 1,43223. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan proses program POS di Pasar Banyuasri telah berjalan cukup efektif. Proses implementasi program mampu melibatkan pelaku usaha secara aktif dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya akuntabilitas pajak. Dengan proses yang sistematis dan berbasis pada kebutuhan, hasil evaluasi ini memberikan gambaran bahwa POS dapat menjadi strategi yang berkesinambungan dalam membangun budaya kepatuhan pajak. Selanjutnya pada variable produk dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Rekapitulasi Per Butir Masing-Masing Item Kuisisioner Produk

No Butir	Skor Z	Arah
1	0,073455	Positif
2	0,367277	Positif
3	-1,39565	Negatif
4	0,954919	Positif
5	1,542562	Positif
6	-5,50915	Negatif
7	-0,80801	Negatif
8	-3,4524	Negatif
9	-1,68947	Negatif
10	0,367277	Positif
11	0,367277	Positif
12	-5,21533	Negatif
13	0,073455	Positif
14	-10,5041	Negatif
15	0,661098	Positif
Jumlah +		8
Jumlah -		7
Hasil		Positif

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa dari 11 butir item pertanyaan, 6 butir memperoleh hasil positif yaitu butir 1 (0,073455), butir 2 (0,367277), butir 4 (0,954919), butir 5 (1,542562), butir 10 (0,367277), dan butir 11 (0,367277), sementara 5 butir lainnya menunjukkan hasil negatif yaitu butir 3 (-1,39565), butir 6 (-5,50915), butir 7 (-0,80801), butir 8 (-3,4524), dan butir 9 (-1,68947). Dengan jumlah skor positif lebih banyak dibandingkan skor negatif, serta skor tertinggi berada pada butir 5 dengan nilai 1,542562, arah efektivitas variabel produk ditetapkan positif. Hal ini menandakan bahwa produk dari program POS di Pasar Banyuasri telah mampu memberikan manfaat nyata, baik berupa peningkatan kesadaran akuntabilitas pajak maupun kemudahan dalam pencatatan transaksi. Evaluasi ini menegaskan bahwa dampak yang dihasilkan dari program POS bersifat konstruktif, relevan, dan mendukung terwujudnya tujuan utama program. Hasil analisis variable konteks, input, proses dan produk dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil Analisis Variabel Konteks, Input, Proses dan Produk

Variabel	Arah Skor-T			Keterangan
	F +	F -	Hasil	
Konteks	47	45	+	++++
Input	56	36	+	
Proses	59	33	+	
Produk	60	32	+	

Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan hasil evaluasi menunjukkan arah positif (+) pada seluruh komponen model CIPP. Pada variabel Konteks diperoleh $\sum(+)$ = 47 lebih besar dari $\sum(-)$ = 45; pada Input diperoleh $\sum(+)$ = 56 lebih besar dari $\sum(-)$ = 36; pada Proses diperoleh $\sum(+)$ = 59 lebih besar dari $\sum(-)$ = 33; dan pada Produk diperoleh $\sum(+)$ = 60 lebih besar dari $\sum(-)$ = 32. Dengan demikian, implementasi Program Point of Sale (POS) sebagai strategi peningkatan kesadaran akuntabilitas pajak pada pelaku usaha di Pasar Banyuwangi dinyatakan efektif (+) pada seluruh dimensi evaluasi.

4.2 Pembahasan

Data menunjukkan skor minimum 14 dan maksimum 30, rata-rata 24,22, median 25, modus 24, standar deviasi 3,24, dan varians 10,55. Nilai rata-rata berada pada kategori sangat baik ($X \geq 24$). Skor-T menunjukkan $\sum(+)$ = 47 lebih besar dari $\sum(-)$ = 45, sehingga dinyatakan efektif (+). Dari 6 item, 3 positif (butir 1, 3, 6) dan 3 negatif (butir 2, 4, 5), dengan skor tertinggi pada butir 3 sebesar 1,625687. Temuan ini menunjukkan program POS relevan dengan kebutuhan pedagang dan mendukung transparansi serta akuntabilitas pajak. Meski demikian, butir negatif menunjukkan masih ada resistensi dan perlunya sosialisasi serta pendampingan berkelanjutan.

Skor minimum 18 dan maksimum 30, rata-rata 25,42, median 26, modus 26, standar deviasi 2,92, dan varians 8,55. Mayoritas responden (72,8%) menilai sangat baik. Skor-T menunjukkan $\sum(+)$ = 56 lebih besar dari $\sum(-)$ = 36, sehingga efektif (+). Terdapat 3 butir positif (3, 4, 5) dan 3 negatif (1, 2, 6), dengan skor tertinggi pada butir 5 sebesar 1,59474. Input program seperti perangkat, jaringan, dan kebijakan sudah memadai, namun kendala literasi digital, kemampuan teknis, dan kestabilan jaringan masih menjadi hambatan. Pelatihan dan pendampingan diperlukan agar POS optimal dalam mendukung pelaporan pajak.

Skor minimum 14 dan maksimum 30, rata-rata 24,97, median 26, modus 27, standar deviasi 3,38, dan varians 11,42. Mayoritas (65,2%) menilai sangat baik. Skor-T menunjukkan $\sum(+)$ = 59 lebih besar dari $\sum(-)$ = 33, sehingga efektif (+). Terdapat 3 item positif (3, 4, 6) dan 3 negatif (1, 2, 5), dengan skor tertinggi pada butir 3 sebesar 1,43223. Pelaksanaan POS berjalan sesuai prosedur, menciptakan pencatatan transaksi yang lebih sistematis dan transparan. Namun, tantangan konsistensi penggunaan dan gangguan teknis masih muncul, terutama saat transaksi ramai.

Skor minimum 43 dan maksimum 74, rata-rata 62,65, median 64, modus 63, standar deviasi 6,54, dan varians 42,80. Mayoritas (94,1%) menilai sangat baik. Skor-T menunjukkan $\sum(+)$ = 60 lebih besar dari $\sum(-)$ = 32, sehingga efektif (+). Terdapat 8 butir positif dan 7 negatif, dengan skor tertinggi pada butir 5 sebesar 1,542562. Output dan outcome program menunjukkan peningkatan efisiensi pencatatan, transparansi, dan kepatuhan pajak. POS membantu mengurangi human error dan memudahkan pelaporan, meski masih ada kendala teknis dan persepsi beban administrasi.

Hasil evaluasi menunjukkan pola (+ + +) pada Context, Input, Process, dan Product. Program POS efektif meningkatkan kesadaran dan akuntabilitas pajak. Studi Sumarto (2023), Rosyadi dkk. (2025), Primasari dan Wibisono (2022), Sipayung dkk. (2020), Vianney dan Bakar (2023), Wiraksini dan Sulindawati (2025), serta Kudus dan Nasution (2025) memperkuat

temuan bahwa digitalisasi transaksi meningkatkan transparansi, akurasi, dan kepatuhan pajak (misalnya akurasi pelaporan dari 78% menjadi 95%, kepatuhan waktu dari 67% menjadi 100%, efisiensi waktu 80%). Keberhasilan Context dan Product menunjukkan relevansi dan manfaat nyata, sedangkan Input dan Process masih memerlukan penguatan pelatihan, pendampingan, dan monitoring.

5. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi program Point of Sale (POS) sebagai strategi peningkatan kesadaran akuntabilitas pajak pada pelaku usaha di Pasar Banyuasri menunjukkan bahwa seluruh variabel CIPP dinyatakan efektif (+). Variabel Context efektif dengan $\sum (+) = 47$ lebih besar dibandingkan $\sum (-) = 45$ dan rata-rata kategori sangat baik, menandakan program relevan dengan kebutuhan pedagang serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pajak. Variabel Input juga efektif dengan $\sum (+) = 56$ lebih besar dibandingkan $\sum (-) = 36$ dan kategori sangat baik, meskipun masih terdapat kendala literasi digital dan infrastruktur jaringan. Variabel Process dinyatakan efektif dengan $\sum (+) = 59$ lebih besar dibandingkan $\sum (-) = 33$ dan kategori sangat baik, menunjukkan pelaksanaan POS cukup sistematis dan meningkatkan pemahaman akuntabilitas, walaupun konsistensi penggunaan saat transaksi ramai masih menjadi hambatan. Variabel Product efektif dengan $\sum (+) = 60$ lebih besar dibandingkan $\sum (-) = 32$ dan kategori sangat baik, dengan dampak berupa peningkatan transparansi transaksi, kesadaran kewajiban pajak, dan kemudahan pelaporan, meski sebagian pedagang masih merasakan beban administrasi dan kendala teknis. Secara keseluruhan hasil evaluasi menunjukkan pola (+ + + +), yang berarti program POS tergolong efektif, namun tetap memerlukan penguatan literasi digital, perbaikan infrastruktur, serta monitoring berkelanjutan sebagai bahan refleksi dan rekomendasi bagi pengelola pasar, pemerintah daerah, dan pengembang aplikasi untuk peningkatan kualitas program di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Agung, A. A. G. (2021). Evaluasi program pelatihan vokasional berbasis potensi lokal masyarakat pesisir. *Jurnal Inovasi Sosial dan Pembangunan*, 6(2), 67–75. <https://doi.org/10.23887/jisp.v6i2.37834>
- Agung, A., dkk. (2023). Evaluasi Program dengan Model CIPP. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Ed. Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Cobbe, J., Lee, M. S. A., & Singh, J. (2021). *Reviewable automated decision-making: A framework for accountable algorithmic systems*. Proceedings of the ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAccT).
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Danardani, W., & Hidayat, S. (2022). Evaluasi program latihan psikologi dalam periodisasi latihan di klub Akademi Bola Voli Buleleng. *Jurnal Ilmu Keolahragaan*, 4(2), 108–115. <https://doi.org/10.23887/jik.v4i2.44444>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Dewantari, D. P. A. D., Sulindawati, N. L. G. E., SE Ak, M., Atmadja, A. T., & SE, A. (2017). Implikasi dan Evaluasi Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak pada Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 7(1).

- Dewi, N. P. D., & Darma, G. S. (2024). Digitalization of taxation and taxpayer compliance. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 5(2), 464–473. <https://doi.org/10.38035/dijefa.v5i2>
- Dewi, & Santoso. (2020). Evaluasi efektivitas program POS untuk pengawasan transaksi dan akuntabilitas perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 12(3), 145-160.
- Dewi, G. A. K. R. S. (2014). *Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal pada Kecurangan Akuntansi*. SciSpace Journal of Accounting Studies.
- Dewi, G. A. K. R. S. (2018). *Expectation-Gap pada Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. *Ejournal STIESIA*, 2(4), 3931.
- Dewi, G. A. K. R. S. (2019). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa serta Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Dewi, G. A. K. R. S. (2020). *Akuntabilitas terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa*. *Ejournal UPI*.
- Dewi, G. A. K. R. S. (2021). *Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas, dan Peran Pendamping Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa*. *JIMAT: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Dewi, G. A. K. R. S. (2022). *Analisis Strategi Pengelolaan Keuangan dan Strategi Keberlanjutan Usaha*. *Repository Dosen Undiksha*.
- Dewi, I. A. P. P., Yudiantara, I. G. A. P., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat singlaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(3), 417-426.
- Dewi, N. P. A., Sujana, I. N., & Meitriana, M. A. (2020). Evaluasi program sistem pertanian terintegrasi (Simantri). *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 12(1), 107-116.
- Divayana, D. G. H. (2020). Pengembangan model evaluasi berbasis teknologi fuzzy untuk program pelatihan keterampilan digital. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 5(1), 60–70. <https://doi.org/10.23887/jtsi.v5i1.29892>
- Fatmawati, S., Bulutoding, L., & Jannah, R. (2024). Pengaruh motivasi, dan akuntabilitas perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan moderasi media sosial di KP2KP Sungguminasa Kabupaten Gowa. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 6(1), 11-20.
- Fitrianiingsi, L. N. (2024). Analisis akuntabilitas pelayanan publik dalam kepatuhan wajib pajak (studi pada kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan KP2KP Taliwang). *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, 3(2), 22-35.
- Glickman, C. D. (1981). *Developmental Supervision: Alternative Practices for Helping Teachers Improve Instruction*. New York: Longman.
- Glickman, C. D., Gordon, S. P., & Ross-Gordon, J. M. (2017). *Supervision and instructional leadership: A developmental approach* (9th ed.). Pearson Education.
- Herawati, N. T., Yasa, I. N. P., Resmi, N. N., & Yastini, N. L. G. (2022). *The Role of Tax Literacy on Economics Undergraduated Students' Tax Awareness*. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 7(1), 111-127.
- Julianto, I. P., Wiguna, I. G. N. H., & Yasa, I. N. P. (2022). Analysis of the digitalization of accounting information systems in supporting the sustainability of MSMEs during the pandemic (Study on MSMEs in Buleleng Regency). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13(4), 1277–1285.
- Kementerian Perdagangan RI. (2022). *Laporan Digitalisasi Pasar Rakyat Tahun 2022*. Jakarta: Kemendag.
- Komarudin, & Sarkadi. (2017). *Statistika untuk Penelitian Sosial*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

- Lasmawan, I. W. (2021). Evaluasi indikator kinerja utama fakultas dalam lingkup sosial dan humaniora. *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora*, 6(1), 45–57. <https://doi.org/10.23887/jish.v6i1.32980>
- Mahadewi, I. A., Candiasa, I. M., & Divayana, D. G. H. (2023). *The Evaluation of Online Learning Effectiveness in Economic Course*. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 56(3), 473–480.
- MDPI Greece. (2024). Transparency through digital receipts and POS systems. *Sustainability Journal*, 16(2), 900.
- OECD. (2019). *Tax administration 2019: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/74d162b6-en>
- Owen, J. M. (2016). *Program Evaluation: Forms and Approaches* (4th ed.). Routledge.
- Paramita, R., dkk. (2021). Teknik Pengambilan Sampel dalam Penelitian. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Parmiti, D. P. (2021). Evaluasi ketercapaian output program pemberdayaan masyarakat berbasis UMKM. *Jurnal Pemberdayaan Sosial*, 3(2), 55–62. <https://doi.org/10.23887/jps.v3i2.37532>
- Patton, M. Q. (2014). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Pertiwi, N. P. P. I. J., Yuniarta, G. A., & Werastuti, D. N. S. (2025). The influence of political connections and foreign ownership on tax avoidance with corporate governance as a moderating variable. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 6(3), 2323–2335. <https://doi.org/10.38035/dijefa.v6i3>
- Petter, S., DeLone, W., & McLean, E. R. (2018). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, 24(4), 9–30. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240401>
- Prameswari, I. G. A. I. P., Adiputra, I. M. P., & Sinarwati, N. K. (2025). The influence of creative accounting and tax planning on financial performance with corporate social responsibility as a moderating variable in the tourism industry in Indonesia. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 6(5), 4748–4760. <https://doi.org/10.38035/dijefa.v6i5>
- Putra, I. N. G., Artawan, K. W., & Sudarma, I. K. (2019). Evaluasi Program Pendidikan dengan Model CIPP dan Teori Glickman. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 10(2), 112–120.
- Raharjo, S., & Cahyadi, A. (2020). Transformasi digital pada usaha mikro: studi kasus penerapan aplikasi POS. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 5(2), 22–29.
- Rahayu, & Nurhadi. (2019). Dampak penggunaan sistem POS terhadap kepatuhan dan akuntabilitas wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 33–45.
- Rahayu, S. (2023). Program Pelatihan dan Keberhasilan Implementasi Teknologi di Pasar Tradisional. *Jurnal Manajemen UKM*, 15(3), 102–118.
- Rama, A., Ambiyar, A., Rizal, F., Jalinus, N., Waskito, W., & Wulansari, R. E. (2023). Konsep model evaluasi context, input, process dan product (CIPP) di sekolah menengah kejuruan. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia (JRTI)*, 8(1), 82–86. <https://doi.org/10.29210/30032976000>
- Salsabila, A. F., Khalmayra, A., Bagaskara, E., Nabila, H., & Tazkiyatunnufus, M. (2024). Model evaluasi CIPP dalam mengevaluasi program kesetaraan Paket C di PKBM Istiqomah. *Jurnal Transformasi*, 10(1), 78–85. <https://doi.org/10.33394/jtni.v10i1.10030>
- Santosa, I. M., Candiasa, I. M., & Koyan, I. W. (2013). Pengaruh model kontekstual berbasis asesmen kinerja terhadap hasil belajar siswa. *Jurnal Evaluasi dan Riset*, 7(2), 75–83. <https://doi.org/10.23887/jer.v7i2.19901>
- Saputra, D., & Andini, M. (2023). Analisis dampak penggunaan sistem POS terhadap pendapatan pedagang tradisional. *Jurnal Inovasi Bisnis UMKM*, 7(1), 55–64.
- Sari, R. P., dkk. (2023). Pengaruh Penggunaan Aplikasi POS terhadap Efisiensi Manajemen Stok pada UMKM. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*.

- Stufflebeam, D. L. (2007). *The CIPP Model for Evaluation: An Update, A Review of the Model's Development, and a Checklist to Guide Implementation*. Western Michigan University, The Evaluation Center.
- Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). *Evaluation Theory, Models, and Applications*. Jossey-Bass.
- Stufflebeam, D. L., & Zhang, G. (2017). *The CIPP evaluation model: How to evaluate for improvement and accountability*. Guilford Press.
- Suarjana, I. M. (2022). Evaluasi pelaksanaan program kelas inklusi pada sekolah dasar. *Jurnal Ilmu Sosial Terapan*, 5(1), 88–97. <https://doi.org/10.23887/jist.v5i1.40312>
- Suartama, I. K. (2022). Evaluasi implementasi program pembinaan keterampilan vokasional berbasis daring. *Jurnal Vokasi dan Teknologi*, 6(2), 120–128. <https://doi.org/10.23887/jvt.v6i2.40922>
- Sugihartini, N., & Widiana, I. W. (2019). Evaluasi program orientasi kerja berbasis blended learning. *Jurnal Manajemen Inovasi dan Teknologi*, 8(3), 145–153. <https://doi.org/10.23887/jmit.v8i3.31011>
- Sugiyono. (2019). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sumiani, N. K. (2023). *Evaluasi program layanan percepatan jabatan akademik secara holistik integratif*. [Tesis tidak diterbitkan]. Pascasarjana Universitas.
- Susanto, R., & Kartowagiran, B. (2021). Evaluasi Program Pelatihan Guru dengan Pendekatan CIPP-Glickman. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 25(2), 145–157.
- Utami, N. W., Arthana, I. K. R., & Darmawiguna, I. G. M. (2020). Evaluasi usability pada sistem e-learning dengan metode usability testing. *Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika (JANAPATI)*, 9(1), 107–115. <https://doi.org/10.23887/janapati.v9i1.25161>
- Venkatesh, V., Thong, J. Y. L., & Xu, X. (2019). Unified theory of acceptance and use of technology: A synthesis and the road ahead. *Journal of the Association for Information Systems*, 17(5), 328–376. <https://doi.org/10.17705/1jais.00428>
- Wang, L., & Zhang, Y. (2021). Integrating Data Visualization in Educational Program Evaluation. *Journal of Educational Measurement and Evaluation*, 12(3), 211–223.
- Warschauer, M., & Matuchniak, T. (2015). "New Technology and Digital Worlds: Analyzing Evidence of Equity in Access, Use, and Outcomes." *Review of Research in Education*, 34(1), 179–225.
- Wicaksono, D., & Hartanto, B. (2019). Literasi digital pedagang pasar tradisional: studi awal. *Jurnal Komunikasi Digital*, 2(1), 12–20.
- Widiana, I. K. A. (2017). Evaluasi Program Bantuan Dana Bergulir Pada Empat Koperasi Penerima Program Bantuan Dana Bergulir Di Kabupaten Buleleng Tahun 2014. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 9(1), 118-129.
- World Bank. (2024). *Improving local tax compliance through point-of-sales devices in Indonesia*. World Bank Report.
- Yasa, I. S., Divayana, D., & Sulindawati, N. E. (2023). Evaluasi Program Pendidikan Inklusi di SD Bali Hati. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(2), 2873-2886. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v4i2.692>
- Zhang, G., Zeller, N., Griffith, R., Metcalf, D., Williams, J., Shea, C., & Misulis, K. (2011). "Using the Context, Input, Process, and Product Evaluation Model (CIPP) as a Comprehensive Framework to Guide the Planning, Implementation, and Assessment of Service-Learning Programs." *Journal of Higher Education Outreach and Engagement*, 15(4), 57–84.
- Zou, Y., Razali, F., & Mustakim, S. S. B. (2024). Exploring universal implementation strategies: Comparative analysis of CIPP models. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 13(3), 1084–1090. <https://doi.org/10.6007/IJARPED/v13-i3/21838>